



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN **2025**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan bulan Maret 2025 atau di TW I. Rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.



Pangkajene Sidenreng, Agustus 2025

Kepala Dinas,

ANDI NIURWAN, ST, MM

NIP. 19750703 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	8
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	21
3.1 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Renja 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP 2024-2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mempedomani tema dan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu "Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia", dengan Prioritas Pembangunan: (1) Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, (3) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas, (4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan, (5) Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius, (6) Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, (7) Pembangunan infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dimaksud;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2025 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 didasarkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel II-1 sebagai berikut :

TABEL II-1
Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan (Dokumen)	1	1 Dokumen	1	0	0	1	100
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3	1 Dokumen	1	0	0	1	33
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah (Dokumen)	12	12 Dokumen	12	0	0	12	\
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1	0	0	0	0
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	36	12 Dokumen	1	0	0	12	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	100	85 %	100	0	0	85	85
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota (Kegiatan)	2	1 Kegiatan	2	0	0	1	50
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	0	1	0	0	0	0
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	1 Dokuemn	0	0	0	1	33
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	95	68 %	95	0	0	68	72
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	255	170 Pelaku Usaha	255	0	0	170	67
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	18	6 Kegiatan Usaha	52	0	0	6	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	760	170	Pelaku Usaha	0	0	0	170	22
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	99	92	Kegiatan Usaha	30	0	0	92	93
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	90	79	%	85	0	0	79	88
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP (Izin)	5,100	4,755	Izin	5,200	347	0.07	5,102	100
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	0	Dokumen	1	0	0	0	0

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15,600	4,755	Pelaku Usaha	5,200	347	0	5,102	33
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	48	32	Pelaku Usaha	15	37	2	69	144
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	780	250	Kegiatan Usaha	260	0	0	250	32
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	100	100	%	100	0	0	100	100
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina (Dokumen)	4	4	Dokumen	4	0	0	4	100
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	Dokumen	4	1	0	5	125

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)	100	100 %	100	0	0	100	100
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1 Dokumen	3	1	0	2	67
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokumen	3	1	0	2	200
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1 Laporan	1	1	1	2	67
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	98 %	100	0	0	98	98
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	18 Orang/Bulan	19	18	1	36	63
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1 Laporan	1	0	0	1	33

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12	97 %	12	0	0	97	804
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	111	37 Paket	4	0	0	37	33
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78	26 Paket	0	0	0	26	33
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12 Paket	0	0	0	12	100
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	3 Laporan	2	0	0	3	60
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	10 Laporan	8	2	0	12	27
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	0 %	100	0	0	0	0
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	0 Unit	8	0	0	0	0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	96 %	12	0	0	96	797
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390	91 Laporan	130	154	1	245	63
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12 Laporan	12	3	0	15	42

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD pada Tahun 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan I Tahun 2025			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	4	Laporan	4	0	0	4	27
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	Laporan	12	3	0	15	42
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	%	100	0	0	100	100
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39	13	Unit	13	0	0	13	33
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	Unit	1	0	0	0	0

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strengths and Weaknesses*) dan kondisi eksternal (*Opportunities and Threats*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin.

1.2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
- b. Koordinasi dengan investor belum optimal;
- c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

1.1 Kesempatan (Oppurtunities)

- a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
- c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern

1.2 Ancaman (Threats)

- a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan
- d. Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan promosi

Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.

2) Penyempurnaan regulasi

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3) Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT

Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

4) Peningkatan SDM pelayanan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

5) Peningkatan sarana prasarana

Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
- d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
- b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
- e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;
- f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.
- b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

- a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
- b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
- c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
- d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
- e. Pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Renja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan usulan program/ kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - 1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 1.3 Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari kegiatan dan Sub Kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2 Pengadaan Mebel
 - 1.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, Lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	153,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	153,089,500	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	21	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	21	0	
2.18.02.2.01.00 04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	153,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	153,089,500	
2.18.02.2.02.00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	150,787,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	150,629,000	
2.18.02.2.02.00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,460,500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	12,882,000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota (Kegiatan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	12,882,000	
2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	25,354,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	12,882,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	95	21,403,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	95	13,187,500	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	21,403,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	13,187,500	
2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	52	10,410,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	52	4,241,000	
2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	255	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	10,993,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	30	8,946,500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	227,389,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	198,861,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	227,389,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	85	198,861,000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP (Izin)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5,200	227,389,000.00		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5200	198,861,000.00	
2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,195,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	7,033,000	
2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5,200	195,251,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5200	177,807,500	
2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	15	6,532,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	15	5,239,000	
2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	260	15,409,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	260	8,781,500	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	11,295,000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina (Dokumen)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	11,295,000	
2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	21,780,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	11,295,000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,601,232,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,569,303,000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	11,380,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	9,343,000	
2.18.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,297,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	1,942,000	
2.18.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	5,670,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	3	4,647,000	
2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,413,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	2,754,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,048,012,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	2,047,526,500	
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	19	2,045,002,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	19	2,045,002,500	
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,010,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	2,524,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	132,712,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	71,969,500	
2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	37	2,378,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	4	2,378,000	
2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	26	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	26	0	
2.18.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0	
2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	8,828,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	2	8,828,000	
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	10	121,506,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	8	60,763,500	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	114,890,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	118,106,000	
2.18.01.2.07.006	Pengadaan Mebeliur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	0		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	3,216,000	
2.18.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	114,890,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	9	114,890,000	

Perubahan Rencana Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Oagu Indikatif	Kelompok penerima Manfaat
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	215,554,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	218,675,000	
2.18.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	130	1,500,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	130	1,500,000	
2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	48,689,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	54,689,000	
2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,530,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	5	10,530,000	
2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	154,835,500		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12	151,956,000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	78,683,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	100	103,683,000	
2.18.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	13	55,883,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	13	55,883,000	
2.18.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	0	22,800,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	1	47,800,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun 2025.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.